



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 1

TAHUN 1996

SERI D NO. 1

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 17 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995 / 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah , dan Jawa Barat ;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 520 / 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Tahun Anggaran 1995 / 1996.

**Memperhatikan :**

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363 / PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1995 / 1996 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170 / 19 / 1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 12 Desember s/d 15 Desember 1995 ;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 21 Desember 1995 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1995/1996 .

### P a s a l 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/ 1996 semula Rp. 10.962.042.000,00 diperkirakan bertambah Rp.2.549.135.000,00 sehingga menjadi Rp.13.511.177.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 10.962.042.000,00
bertambah	Rp. <u>2.275.098.000,00</u>

Pendapatan setelah Perubahan	Rp. <u><u>13.237.140.000,00</u></u>
------------------------------	-------------------------------------

b. Penerimaan Pembangunan

Sebelum Perubahan	-
bertambah	Rp. <u>274.037.000,00</u>

Penerimaan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. <u><u>274.037.000,00</u></u>
--	----------------------------------

2. Rincian perubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.1 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 10.962.042.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.549.135.000,00 sehingga menjadi Rp. 13.511.177.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 6.833.014.000,00
bertambah .....	<u>Rp. 464.497.000,00</u>

Belanja Rutin setelah  
Perubahan

Rp. 7.297.511.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. 4.129.028.000,00
bertambah .....	<u>Rp. 2.084.638.000,00</u>

Belanja Pembangunan  
setelah Perubahan

Rp. 6.213.666.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran A. II / R dan Lampiran A. II / P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun-  
1995 / 1996 setelah Perubahan menjadi  
Rp. 13.511.177.000,00

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula ..... Rp.1.017.199.000,00  
diperkirakan bertambah Rp.18.847.000,00 sehingga menjadi  
..... Rp.1.036.046.000,00.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.1 Peraturan Daerah ini.

## - Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula ..... Rp. 1.017.199.000,00  
diperkirakan bertambah Rp.18.847.000,00 sehingga menjadi  
..... Rp.1.036.046.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 1.017.199.000,00
bertambah .....	<u>Rp. 18.847.000,00</u>

Belanja Rutin setelah perubahan

Rp. 1.036.046.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. -
bertambah .....	<u>Rp. -</u>

Belanja Pembangunan setelah Perubahan

Rp. -

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.II / R Peraturan Daerah ini.

## P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Salatiga ,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

KETUA ,

Cap. ttd

Cap. ttd

RUPA GINTING

Drs. INDRU SUPARNO

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Dengan Keputusan Tanggal 9 Pebruari 1996  
Nomor :- 903/315/1996  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

**SUWARDI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor : 1 Tanggal 19 Pebruari 1996  
Seri : D No . 1

Cap. ttd.

**Drs. SUWARSO**

NIP. 010.041.593

**PENGGERSERAN : PENGURANGAN DAN  
PENAMBAHAN PADA PASAL - PASAL**

No.	POS	P A S A L		
1	2.2.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1071 s/d 1072
2	2.2.2.	1001 b	1009b	1010 b
3	2.2.3.	1011 s/d 1049 1084 s/d 1100	1051 s/d 1054	1071 s/d 1074
4	2.2.4.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1094
5	2.2.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
6	2.2.6.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
7	2.2.8.A.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
8	2.2.8.B.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
9	2.2.8.C.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
10	2.2.8.D.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
11	2.2.9.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
12	2.2.10.	1011 s/d 1016	-	-
13	2.2.11.	-	-	-
14	2.3.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
15	2.3.2.	-	-	-
16	2.3.3.	-	-	-
17	2.5.1.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1054	1081 s/d 1090
18	2.5.2.	1011 s/d 1026	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
19	2.8.4.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1057	1081 s/d 1090
20	2.8.5	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
21	2.10.1	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1093

**IKHTISAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAH BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SLAATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BER-KURANG)	PRO-SENT %	NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BER-KURANG)	PRO-SENT %
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN</b>						<b>BELANJA</b>				
							<b>L BELANJA RUTIN</b>				
1	Bagian : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	101,591,000	592,321,000	490,730,000	483.04	1	DPRD	173,860,000	173,860,000	0	0.00
	Pos : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	101,591,000	592,321,000	490,730,000	483.04	2	Kepala Daerah	189,300,000	189,300,000	7,000,000	3.84
						3	Bendahara Pegawai	3,513,136,000	3,526,864,000	13,720,000	0.39
						4	Bendahara	1,436,931,000	1,436,931,000	82,520,000	6.09
						5	Bendahara Pembantu	316,516,000	316,516,000	10,107,000	3.30
						6	Belanja Lain-lain	112,671,000	112,671,000	53,265,000	89.65
						7	Anggaran Hibang dan Bunga	124,375,200	124,375,200	210,401,000	20.36
						8	Pensiun/Understand	3,000,000	3,000,000	0	0.00
						9	Gajilan, Subsidi, Sumbangan	42,562,000	42,562,000	20,842,000	48.50
						10	Pengeluaran Tak Termasuk Bagian	119,545,000	119,545,000	163,363,000	39.17
						11	Pengeluaran Tak Tersangka	15,000,000	15,000,000	49,828,000	39.17
						12		15,000,000	15,000,000	0	0.00
							<b>Jumlah Belanja Rutin</b>	<b>6,833,014,000</b>	<b>7,207,511,000</b>	<b>484,497,000</b>	<b>6.80</b>
							<b>H. BELANJA PEMBANGUNAN</b>				
						2P01	Sektor Industri	29,000,000	29,000,000	0	0.00
						2P02	Sektor Pertanian & Kehutanan	53,000,000	54,000,000	1,000,000	0.60
						2P03	Sektor Sumber Daya Air dan Irigrasi	10,000,000	10,000,000	0	0.00
						2P04	Sektor Tenaga Kerja	7,000,000	7,000,000	0	0.00
						2P05	Sektor Pengembangan, Pengembangan Usaha Sani, Keuangan, Daerah dan Koperasi	131,068,000	132,068,000	1,000,000	0.76
						2P06	Sektor transportasi	2,186,936,000	2,728,756,000	541,820,000	24.78
						2P07	Sektor Pertahanan dan Energi	54,117,000	54,117,000	0	0.00
						2P08	Sektor Pertahanan dan Energi Daerah	315,351,000	315,351,000	0	0.00
						2P09	Sektor Pembangunan Daerah dan	433,020,000	433,020,000	117,069,000	37.05
						2P10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	119,850,000	119,850,000	392,214,000	327.12
						2P011	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional	229,295,000	437,249,000	207,954,000	90.69
							Keperawatan Terhadap Tukan Yang Mania Esa Pemuda Dan Olah Raga				
						2P012	Sektor Kepenzukukan dan Keluarga	7,000,000	7,000,000	0	0.00
							Berencana Segitiera				
						2P013	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Perumahan, Anak & Remaja	51,047,000	588,440,000	537,393,000	1052.74
						2P014	Sektor Perumahan dan Pemukiman	12,000,000	30,000,000	18,000,000	150.00
						2P015	Sektor Agama	50,750,000	55,717,000	4,967,000	9.79
						2P016	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	49,000,000	49,000,000	3,000,000	5.77
						2P017	Sektor Administrasi, Perencanaan, Pengawasan	17,300,000	27,000,000	9,500,000	54.29
						2P018	Sektor Politik, Penerangan, Komarkasi dan Media Massa	681,840,000	920,840,000	239,000,000	34.13
						2P019	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	72,000,000	66,000,000	6,000,000	8.33
						2P020		31,125,000	34,845,000	3,720,000	11.95
							<b>Jumlah Belanja Pembangunan</b>	<b>4,129,028,000</b>	<b>6,213,666,000</b>	<b>2,084,638,000</b>	<b>50.49</b>
							<b>Jumlah Belanja (1 + 8)</b>	<b>10,962,042,000</b>	<b>13,511,177,000</b>	<b>2,549,135,000</b>	<b>23.25</b>